LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

PEMBAGIAN ISU PADA UNIT ORGANISASI DAN BIDANG DI PERWAKILAN

NO	ISU	UNIT ORGANISASI/BIDANG	KODE	TAHAP	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		PELAKSANA TUGAS	HASIL KERJA	SUBUNSUR KEGIATAN
1	Pembentukan Opini Positif dan Dukungan Publik	- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya di Perwakilan	I.A.6.1	Perencanaan	1	Mengidentifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	Managing
			II.A.6.1		2	Mempersiapkan materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	materi	

				III.A.6.1		3	Menganalisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.A.6.1		4	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.A.6.2		5	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	konsep	
				III.A.6.2		6	Menganalisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	draf	
				IV.A.6.2		7	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.A.1.1	Pelaksanaan	8	Melakukan tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	Representing

				II.A.1.1		9	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	materi	
				III.A.1.1		10	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.A.1.1		11	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				I.A.1.2		12	Melakukan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	laporan	
				II.A.1.2		13	Melakukan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	laporan	
				III.A.1.2		14	Melakukan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	laporan	
				IV.A.1.2		15	Melakukan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	laporan	

				I.A.1.3		16	Melakukan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	laporan	
				II.A.1.3		17	Melakukan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	laporan	
				III.A.1.3		18	Melakukan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	laporan	
				IV.A.1.3		19	Melakukan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	laporan	
				I.A.5.1	Evaluasi	20	Mempersiapkan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	tabulasi data/informasi	Reporting
				II.A.5.1		21	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	materi	
				III.A.5.1		22	Menganalisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	

				IV.A.5.1		23	Melakukan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	laporan evaluasi	
2	Kunjungan/ Pertemuan/ Sidang/ Konferensi Internasional & Tindak Lanjut hasil pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, Sidang/ Konferensi Internasional	- -	Semua Unit Kerja Semua Fungsi di Perwakilan	I.B.1.4	Perencanaan	24	Mempersiapkan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Representing
				II.B.1.4		25	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	materi	
				III.B.1.4		26	Menganalisis materi kunjungan/ pertemuan/ sidang /konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.B.1.4		27	Melakukan finalisasi materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				I.B.1.5	Pelaksanaan	28	Melakukan koordinasi operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.B.1.5		29	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	

				III.B.1.5		30	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.B.1.5		31	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.B.1.6		32	Melakukan kegiatan operasional terkait kunjungan / pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.B.1.6		33	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.B.1.6		34	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.B.1.6		35	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan /pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.B.5.2	Evaluasi	36	Melakukan inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	Reporting

				II.B.5.2		37	Mengolah materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	materi	
				III.B.5.2		38	Menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.B.5.2		39	Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan kajian	
3	Pendekatan/ Pembinaan terhadap Pemangku Kepentingan/ Mitra Kerja	Semua Fungsi di Perwakilan		I.C.1.7	Perencanaan	40	Mempersiapkan daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan	Ahli Pertama	daftar	Representing
				II.C.1.7		41	Mengolah daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan	Ahli Muda	materi	
				III.C.1.7		42	Menyusun rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri	Ahli Madya	konsep	
				IV.C.1.7		43	Melakukan finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi	

			I.C.1.8	Pelaksanaan	44	Melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
			II.C.1.8		45	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Muda	laporan	
			III.C.1.8		46	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Madya	laporan	
			IV.C.1.8		47	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Utama	laporan	
			I.C.1.9		48	Melakukan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait	Ahli Pertama	laporan	
			II.C.1.9		49	Melakukan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait	Ahli Muda	laporan	
			III.C.1.9		50	Melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait	Ahli Madya	laporan	
			IV.C.1.9		51	Melakukan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait	Ahli Utama	laporan	
			I.C.1.10		52	Melakukan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
			II.C.1.10		53	Melakukan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	

				III.C.1.10		54	Melakukan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.C.1.10		55	Melakukan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
4	Hukum dan Perjanjian Internasional	-	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	II.D.1.11	Perencanaan	56	Menyiapkan data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	kompilasi data dan informasi	Representing
		-	Semua Fungsi di Perwakilan	III.D.1.11		57	Menganalisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	analisis	
				IV.D.1.11		58	Melakukan finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.D.1.12		59	Melakukan penyusunan konsep perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	konsep	
				III.D.1.12		60	Menganalisis konsep perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	draf	
				IV.D.1.12		61	Melakukan finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi	
				I.D.6.2	Pelaksanaan	62	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Managing
				II.D.6.3		63	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	tabulasi materi	
				III.D.6.3		64	Menganalisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	

				IV.D.6.3		65	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				II.D.6.4		66	Mengolah data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	draf	
				III.D.6.4		67	Menganalisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	konsep	
				IV.D.6.4		68	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.D.1.11		69	Melakukan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	laporan	Representing
				II.D.1.13		70	Melakukan konsultasi teknis terkait hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	laporan	
				III.D.1.13		71	Melakukan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	laporan	
				IV.D.1.13		72	Melakukan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	laporan	
				I.D.5.3		73	Mengidentifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Reporting
				II.D.5.3		74	Mengolah materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	materi	
				III.D.5.3		75	Menganalisis implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.D.5.3		76	Melakukan finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi	

				I.D.5.4	Evaluasi	77	Melaksanakan inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	
				II.D.5.4		78	Mengolah materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	konsep	
				III.D.5.4		79	Menganalisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	draf	
				IV.D.5.4		80	Menyusun hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	laporan evaluasi	
5	Protokol	- -	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Fungsi Protokol dan/atau Konsuler di Perwakilan	I.E.6.3	Perencanaan	81	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Managing
				II.E.6.5		82	Melakukan penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Muda	materi	
				III.E.6.5		83	Menganalisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.E.6.5		84	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.E.6.6		85	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Muda	konsep	
				III.E.6.6		86	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Madya	draf	
				IV.E.6.6		87	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.E.1.12	Pelaksanaan	88	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Pertama	data/informasi	Representing
				II.E.1.14		89	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Muda	materi	

				III.E.1.14		90	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.E.1.14		91	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				I.E.1.13		92	Melakukan konsultasi operasional di bidang protokol	Ahli Pertama	laporan	
				II.E.1.15		93	Melakukan konsultasi taktis operasional di bidang protokol	Ahli Muda	laporan	
				III.E.1.15		94	Melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol	Ahli Madya	laporan	
				IV.E.1.15		95	Melakukan konsultasi strategis nasional di bidang protokol	Ahli Utama	laporan	
				I.E.1.14		96	Melakukan kegiatan operasional di bidang protokol	Ahli Pertama	laporan	
				II.E.1.16		97	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang protokol	Ahli Muda	laporan	
				III.E.1.16		98	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol	Ahli Madya	laporan	
				IV.E.1.16		99	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang protokol	Ahli Utama	laporan	
				I.E.5.5	Evaluasi	100	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol	Ahli Pertama	kompilasi data	Reporting
				II.E.5.5		101	Mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang protokol	Ahli Muda	konsep	
				III.E.5.5		102	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol	Ahli Madya	draf	
				IV.E.5.5		103	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol	Ahli Utama	laporan evaluasi	

6	Penggalangan Dukungan	- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN - Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral - Fungsi Politik di Perwakilan Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya di Perwakilan		I.F.6.4	Perencanaan	104	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Managing
				II.F.6.7		105	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Muda	materi	
				III.F.6.7		106	Menganalisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.F.6.7		107	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.F.6.8		108	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Muda	konsep	
				III.F.6.8		109	Menganalisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Madya	draf	
				IV.F.6.8		110	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.F.2.1	Pelaksanaan	111	Mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	Negotiating

				II.F.2.1		112	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Muda	materi	
				III.F.2.1		113	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.F.2.1		114	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Utama	rekomendasi	
				I.F.2.2		115	Melakukan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Pertama	laporan	
				II.F.2.2		116	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Muda	laporan	
				III.F.2.2		117	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Madya	laporan	
				IV.F.2.2		118	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Utama	laporan	
				I.F.2.3		119	Melakukan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Pertama	laporan	

				II.F.2.3		120	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Muda	laporan	
				III.F.2.3		121	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Madya	laporan	
				IV.F.2.3		122	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Utama	laporan	
				I.F.5.6	Evaluasi	123	Menyiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Pertama	kompilasi data	Reporting
				II.F.5.6		124	Menyusun konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Muda	konsep	
				III.F.5.6		125	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Madya	draf	
				IV.F.5.6		126	Melakukan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Utama	laporan evaluasi	
7	Perundingan Internasional	- -	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	I.G.6.5	Perencanaan	127	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Managing

			Semua Fungsi di Perwakilan	II.G.6.9		128	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	materi	
				III.G.6.9		129	Menganalisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.G.6.9		130	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.G.6.10		131	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	konsep	
				III.G.6.10		132	Menganalisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	draf	
				IV.G.6.10		133	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.G.2.4	Pelaksanaan	134	Mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	
				II.G.2.4		135	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	materi	
				III.G.2.4		136	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.G.2.4		137	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	rekomendasi materi	Negotiating
				I.G.2.5		138	Melakukan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	laporan	
				II.G.2.5		139	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	laporan	
				III.G.2.5		140	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	laporan	

				IV.G.2.5		141	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	laporan	
				I.G.2.6		142	Melakukan kegiatan operasional terkait perundingan internasional	Ahli Pertama	laporan	
				II.G.2.6		143	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional	Ahli Muda	laporan	
				III.G.2.6		144	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional	Ahli Madya	laporan	
				IV.G.2.6		145	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional	Ahli Utama	laporan	
				I.G.5.7	Evaluasi	146	Mempersiapkan data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	kompilasi data	Reporting
				II.G.5.7		147	Mengolah materi evaluasi kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	konsep	
				III.G.5.7		148	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	draf	
				IV.G.5.7		149	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	laporan evaluasi	
8	Perlindungan WNI dan BHI	- -	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Fungsi Protokol dan/atau Konsuler di Perwakilan	I.H.6.6	Perencanaan	150	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Managing
				II.H.6.11		151	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	tabulasi materi	
				III.H.6.11		152	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	

				IV.H.6.11		153	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.H.6.12		154	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	konsep	
				III.H.6.12		155	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	draf	
				IV.H.6.12		156	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.H.3.1	Pelaksanaan	157	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	tabulasi data/informasi	Protecting
				II.H.3.1		158	Mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	materi	
				III.H.3.1		159	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.H.3.1		160	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				I.H.3.2		161	Melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	

				II.H.3.2		162	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.H.3.2		163	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.H.3.2		164	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.H.3.3		165	Melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.H.3.3		166	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.H.3.3		167	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.H.3.3		168	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.H.5.8	Evaluasi	169	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Reporting

				II.H.5.8		170	Mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	konsep	
				III.H.5.8		171	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	draf	
				IV.H.5.8		172	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan evaluasi	
				I.H.3.4	Pelaksanaan	173	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	tabulasi data/informasi	Protecting
				II.H.3.4		174	Mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	materi	
				III.H.3.4		175	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.H.3.4		176	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				I.H.3.5		177	Melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	

				II.H.3.5		178	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.H.3.5		179	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.H.3.5		180	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.H.3.6		181	Melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.H.3.6		182	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.H.3.6		183	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.H.3.6		184	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.H.5.9	Evaluasi	185	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Reporting

				II.H.5.9		186	Mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	konsep	
				III.H.5.9		187	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	draf	
				IV.H.5.9		188	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan evaluasi	
9	Konsuler	- -	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Fungsi Protokol dan/atau Konsuler di Perwakilan	I.I.6.7	Perencanaan	189	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	Managing
				II.I.6.13		190	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Muda	materi	
				III.I.6.13		191	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.I.6.13		192	Melakukan finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				II.I.6.14		193	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Muda	konsep	
				III.I.6.14		194	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Madya	draf	
				IV.I.6.14		195	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.I.3.7	Pelaksanaan	196	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Protecting

				II.I.3.7		197	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Muda	materi	
				III.I.3.7		198	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.I.3.7		199	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Utama	rekomendasi materi	
				I.I.3.8		200	Melakukan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran	Ahli Pertama	laporan	
				II.I.3.8		201	Melakukan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran	Ahli Muda	laporan	
				III.I.3.8		202	Melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran	Ahli Madya	laporan	
				IV.I.3.8		203	Melakukan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran	Ahli Utama	laporan	
				I.I.3.9		204	Melakukan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran	Ahli Pertama	laporan	
				II.I.3.9		205	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran	Ahli Muda	laporan	
				III.I.3.9		206	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran	Ahli Madya	laporan	
				IV.I.3.9		207	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran	Ahli Utama	laporan	
				I.I.5.10	Evaluasi	208	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Reporting
				II.I.5.10		209	Mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Muda	konsep	
				III.I.5.10		210	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Madya	draf	
				IV.I.5.10		211	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	Ahli Utama	laporan evaluasi	

10	Promosi dan Pengem-bangan Kerja Sama	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Direktorat Jenderal - Amerika dan Eropa Direktorat Jenderal - Kerja Sama ASEAN Direktorat Jenderal - Kerja Sama Multilateral - Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Semua Fungsi di Perwakilan	I.J.6.8	Perencanaan	212	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Managing
			II.J.6.15		213	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	konsep	
			III.J.6.15		214	Menganalisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	draf	
			IV.J.6.15		215	Mengkaji materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	hasil kajian	
			II.J.6.16		216	Melakukan penyusunan konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	konsep	
			III.J.6.16		217	Menganalisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
			IV.J.6.16		218	Melakukan finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
			I.J.4.1	Pelaksanaan	219	Menyiapkan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Promoting
			II.J.4.1		220	Mengolah data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	materi	

				III.J.4.1		221	Menganalisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.J.4.1		222	Mengkaji materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan kajian	
				I.J.4.2		223	Melakukan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.J.4.2		224	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.J.4.2		225	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.J.4.2		226	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.J.4.3		227	Melakukan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.J.4.3		228	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.J.4.3		229	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	

				IV.J.4.3		230	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.J.5.11	Evaluasi	231	Mempersiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data	Reporting
				II.J.5.11		232	Mengolah materi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	konsep	
				III.J.5.11		233	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	draf	
				IV.J.5.11		234	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan evaluasi	
11	Diseminasi Informasi	- -	Semua Unit Organisasi Semua Fungsi di Perwakilan	I.K.4.4	Perencanaan	235	Mempersiapkan penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	data/informasi	Promoting
				II.K.4.4		236	Mengolah materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	materi	
				III.K.4.4		237	Menganalisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.K.4.4		238	Melakukan finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	

				I.K.4.5	Pelaksanaan	239	Melakukan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.K.4.5		240	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.K.4.5		241	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.K.4.5		242	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
12	Pembinaan WNI dan Diaspora	- -	Bidang Penerangan, Sosial, dan Budaya di Perwakilan Fungsi Protokol dan/atau Konsuler di Perwakilan	I.L.4.6	Pelaksanaan	243	Melakukan kegiatan operasional untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	Promoting
				II.L.4.6		244	Melakukan kegiatan teknis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.L.4.6		245	Melakukan kegiatan substansi untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.L.4.6		246	Melakukan kegiatan strategis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Utama	laporan	
13	Kajian dan Telaahan	- -	Semua Unit OrganisasiSemua Fungsi di Perwakilan	I.M.5.12	Independen	247	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan kajian	Reporting
				II.M.5.12		248	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan kajian	
				III.M.5.12		249	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan kajian	

				IV.M.5.12		250	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan kajian	
				I.M.5.13		251	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan kajian	
				II.M.5.13		252	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan kajian	
				III.M.5.13		253	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan kajian	
				IV.M.5.13		254	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan kajian	
				III.M.5.14		255	Menelaah isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan telaahan	
				III.M.5.15		256	Menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan telaahan	
				IV.M.5.14		257		Ahli Utama		
14	Pedoman dan Pengem-bangan Diplomasi	-	Sekretariat Jenderal	I.N.5.14	Pelaksanaan	258	Menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	Reporting
		-	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	II.N.5.14		259	Mengolah materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi	Ahli Muda	materi	
		-	Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	III.N.5.16		260	Menyusun draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi	Ahli Madya	draf	
		-	Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN							
		-	Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral							

		-	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	IV.N.5.15		261	Menyusun rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi	Ahli Utama	rekomendasi	
		-	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Semua Fungsi di Perwakilan	IV.N.5.16	Independen	262	Menyusun rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia	Ahli Utama	rekomendasi	
15	Hubungan dan Politik Luar Negeri	-	Sekretariat Jenderal	I.O.6.9	Perencanaan	263	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	
		-	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	II.O.6.17		264	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	materi	
		-	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	III.O.6.17		265	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	
				IV.O.6.17		266	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	Managing
				II.O.6.18		267	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	konsep	
				III.O.6.18		268	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	draf	
				IV.O.6.18		269	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	
				I.O.5.15	Pelaksanaan	270	Mengidentifikasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data/informasi	Reporting

				II.O.5.15		271	Menganalisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	materi	
				III.O.5.17		272	Menyusun konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	konsep	
				IV.O.5.17		273	Melakukan finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi	
				I.O.5.16		274	Melakukan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	
				II.O.5.16		275	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.O.5.18		276	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	
				IV.O.5.18		277	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
				I.O.1.15		278	Melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	Representing
				II.O.1.17		279	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Muda	laporan	
				III.O.1.17		280	Melakukan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Madya	laporan	

				IV.O.1.17		281	Melakukan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Utama	laporan	
16	Mewakili Indonesia/ Kementerian	- -	Semua Unit Organisasi Semua Fungsi di Perwakilan	I.P.1.16	Independen	282	Mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	Representing
				II.P.1.18		283		Ahli Muda		
				III.P.1.18		284		Ahli Madya		
				IV.P.1.18		285		Ahli Utama		
17	Kegiatan Lainnya terkait Tugas Diplomasi	- -	Semua Unit Organisasi Semua Fungsi di Perwakilan	III.Q.7.1	Independen	286	Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan	Ahli Madya	laporan	Lainnya
				II.Q.7.1		287	Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan	Ahli Muda	laporan	
				I.Q.7.1		288	Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan	Ahli Pertama	laporan	
				II.Q.7.2		289	Melaksanakan kegiatan koordinasi nonsubstansi pada Perwakilan	Ahli Muda	laporan	
				I.Q.7.2		290	Melaksanakan kegiatan koordinasi nonsubstansi pada Perwakilan	Ahli Pertama	laporan	
				III.Q.7.2		291	Melakukan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan nonsubstansi pada Perwakilan	Ahli Madya	laporan	

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

A. SURAT TUGAS SPESIFIKASI KEPAKARAN

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI/PERWAKILAN

SURAT TUGAS

NOMOR: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini menugaskan:

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Jenjang Jabatan	:
Unit Kerja/Perwakilan	:

Untuk melaksanakan tugas jabatan diplomasi urusan ... pada periode ... Yang bersangkutan bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas jabatan secara tertulis.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

(tempat), (tanggal/tahun)

Nama jabatan

Pejabat yang menugaskan

NIP.

B. SURAT TUGAS PENUGASAN NON-TURUNAN PENETAPAN KINERJA UNIT KERJA/ PERWAKILAN

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI/PERWAKILAN

SURAT TUGAS

NOMOR: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini menugaskan:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Jenjang Jabatan :
Unit Kerja/Perwakilan :

Untuk melaksanakan tugas jabatan diplomasi terkait isu ... Yang bersangkutan bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas jabatan secara tertulis.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

(tempat), (tanggal/tahun)
Nama jabatan

Pejabat yang menugaskan
NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

A. TOLOK UKUR DAN BUKTI HASIL KEGIATAN UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

NO	UNSUR DAN SUBUNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		PELAKSANA TUGAS	SATUAN HASIL	TOLOK UKUR		BUKTI FISIK
I	**UTAMA**								
	A	**PENDIDIKAN**							
	a	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
			1	Doktor (S3)	Semua Jenjang	Ijazah	a.	telah mengikuti pendidikan formal pada sekolah atau perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi dan diakui oleh kementerian yang berwenang.	Fotokopi ijazah yang dilegalisir pejabat yang berwenang
			2	Magister (S2)			b.	memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Magister (S2)/Doktor (S3) dari perguruan tinggi di bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri dan belum digunakan dalam usulan penilaian	
			3	Sarjana (S1)			c.	ijazah yang diperoleh dari program pendidikan gelar ganda (*double degree*) hanya dinilai sebagai 1 (satu) ijazah	
	b.	Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis	Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat Setara.						

		di bidang diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.	1	lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	Sertifikat	a.	telah mengikuti diklat fungsional/teknis yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina/Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah/lembaga lain yang berbadan hukum; dan	a.	Surat penugasan
			2	lamanya antara 641-960 jam			b.	memperoleh STTP atau Sertifikat Setara yang memuat informasi tentang tanggal pelaksanaan dan jumlah jam diklat fungsional/teknis, dengan ketentuan:	b.	Fotokopi STTP/sertifikat dilegalisir pimpinan unit kerja Diplomat
			3	lamanya antara 481-640 jam				1 Dalam hal jumlah jam diklat fungsional/teknis tidak tercantum, maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8 (delapan) jam diklat fungsional/teknis per hari	c.	Surat keterangan dari penyelenggara dengan didukung jadwal diklat fungsional/teknis, dalam hal penyelenggara tidak mengeluarkan STTP atau Sertifikat Setara
			4	lamanya antara 161-480 jam				2 Dalam hal satu kegiatan diklat fungsional/teknis memperoleh lebih dari 1 (satu) sertifikat, maka sertifikat dengan jumlah jam terbanyak yang dihitung, sedangkan untuk sertifikat lain yang diperoleh dalam satu kegiatan yang sama tidak dihitung, sepanjang materinya sudah termuat dalam sertifikat dengan jumlah jam terbanyak		
			5	lamanya antara 81-160 jam				3 Dalam hal diklat fungsional/teknis terdiri dari paket-paket diklat dan masing-masing paket mengeluarkan sertifikat maka perhitungan jamnya sesuai dengan sertifikatnya masing-masing		
			6	lamanya antara 31-80 jam						
			7	lamanya kurang dari 30 jam						
	c.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
				Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Semua Jenjang	Sertifikat		telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III dan memperoleh STTP	a.	Surat perintah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dari pimpinan unit kerja
									b.	Fotokopi sertifikat dilegalisir pimpinan unit kerja Diplomat
	B	**DIPLOMASI**								
	a.	Melakukan kegiatan untukdan atas nama negara danpemerintah RepublikIndonesia dalam hubungandengan negara asing dan/atau organisasi	1	Melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan(contoh: menjadi *runner* perundingan/*liaison officer*, mencatat jalannya program)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

		internasional didalam dan di luar negeri (representing)		dan politik luar negeri.			b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			2	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dalam memastikan kebutuhan teknis program/logistik telah tersedia, membuat draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			3	Melakukan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menyempurnakan bahan laporan dan dokumen perundingan internasional, mengkoordinasikan jalannya program)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			4	Melakukan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: memfinalisasi bahan laporan dan dokumen perundingan internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			5	Mewakili Indonesia/ Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri	Semua Jenjang	laporan	a.	Pertemuan/sidang/konferensi/seminar akademis yang membahas hubungan dan politik luar negeri yang melibatkan pihak negara lain dan/atau Organisasi Internasional.	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, berita)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			6	Melakukan tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI.	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya proses tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi (contoh: kompilasi data dan informasi untuk persiapan rapat TK KORA, kompilasi data dan informasi untuk persiapan *public lecture* / promosi budaya di negara akreditasi)
			7	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya penelaahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi (contoh: materi untuk persiapan rapat TK KORA)

			8	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			9	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			10	Melakukan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan. (contoh: mempersiapkan logistik/administrasi rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (contoh: laporan konsultasi operasional untuk persiapan rapat TK KORA)
							c	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			11	Melakukan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan. (contoh: memastikan kesiapan logistik/administrasi rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI			b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			12	Melakukan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan. (contoh: memberi masukan terkait agenda rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			13	Melakukan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan. (contoh: memberi masukan terkait agenda rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			14	Melakukan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (contoh: memorandum, nota dinas/berita terkait program unit kerja/Perwakilan)

				serta kedaulatan NKRI			c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			15	Melakukan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (contoh: memorandum, nota dinas/berita terkait program unit kerja/Perwakilan)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			16	Melakukan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			17	Melakukan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			18	Mempersiapkan data dan informasi untuk penyusunan	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi untuk penyusunan bahan informasi, *basic info/policy diary/*butir wicara/*snapshot*, kertas posisi, bahan pendukung, skenario sidang, dll
			19	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/sidang /konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			20	Menganalisis materi kunjungan/ pertemuan/ sidang /konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			21	Melakukan finalisasi materi kunjungan/ pertemuan/sidang /konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			22	Melakukan koordinasi operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan	Ahli Pertama	laporan	a.	Koordinasi operasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya terkait logistik dengan menunjukkan kepatuhan terhadap jadwal program dan/atau perintah (contoh: penyusunan daftar delegasi, pembuatan berita kedatangan, penyusunan akomodasi dan transportasi persiapan Delegasi RI)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				dan politik luar negeri.			b.	Terlaksananya koordinasi operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum/nota dinas/berita)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			23	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang / konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Koordinasi taktis operasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan subunit kerja (contoh: dalam pengaturan koordinasi teknis kunjungan/ pertemuan/ sidang/konferensi internasional, penyusunan *preseance*, draft awal agenda pertemuan, *administrative arrangement*, kompilasi bahan dari delegasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			24	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/sidang /konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Koordinasi strategis sektoral adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan unit kerja dan unit organisasi (contoh: pendekatan kepada mitra kerja untuk membahas isu-isu dalam kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			25	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang /konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Koordinasi strategis nasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan Instansi/entitas lain (contoh: pendekatan kepada mitra kerja untuk membahas agenda kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, Surat Keputusan kepanitiaan (jika ada)

							c	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			26	Melakukan kegiatan operasional terkait kunjungan / pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum/nota dinas/berita/surat), surat tugas, SK kepanitiaan (jika ada), dokumen yang disepakati pada kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional (*minutes of the meeting*, *agreed minutes,* protokol, dst.)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			27	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan /pertemuan/ sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum/nota dinas/berita/surat), surat tugas, SK kepanitiaan (jika ada), dokumen yang disepakati pada kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional (*minutes of the meeting*, *agreed minutes*, protokol, dst.)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			28	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan /pertemuan/	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/unit organisasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.			b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum/nota dinas/berita/surat), surat tugas, SK kepanitiaan (jika ada), dokumen yang disepakati pada kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional (*minutes of the meeting, agreed minutes*, protokol, dst.)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			29	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas Instansi/entitas yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			30	Melakukan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait	Ahli Pertama	laporan	a.	Pendekatan operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya pendekatan dengan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan diplomasi	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			31	Melakukan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait.	Ahli Muda	laporan	a.	Pendekatan taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya pendekatan kepada pemangku terkait dalam memperjuangkan kepentingan diplomasi	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			32	Melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait.	Ahli Madya	laporan	a.	Pendekatan strategis sektoral adalah komunikasi kepada pemangku kepentingan lintas sektoral untuk memperjuangkan kepentingan diplomasi	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

							b.	Terlaksananya pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			33	Melakukan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait.	Ahli Utama	laporan	a.	Pendekatan strategis nasional adalah komunikasi kepada pemangku kepentingan utama untuk memperjuangkan kepentingan diplomasi	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			34	Mempersiapkan daftar pemangku kepentingan/ mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan.	Ahli Pertama	daftar	a.	Tersedianya daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa daftar
			35	Mengolah daftar pemangku kepentingan/ mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			36	Menyusun rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja dan WNI di luar negeri.	Ahli Madya	konsep	a.	Tersedianya rancangan strategi kegiatan pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			37	Melakukan finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja dan WNI di luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Terlaksananya finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
			38	Melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan logistik/administrasi rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri.			b.	Terlaksananya konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			39	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan. (contoh: memastikan kesiapan logistik/administrasi rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			40	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan(contoh: memberi masukan terkait agenda rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			41	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberi masukan terkait agenda rapat TK KORA)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			42	Melakukan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			43	Melakukan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			44	Melakukan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/unit organisasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			45	Melakukan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/ mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas Instansi/entitas yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			46	Menyiapkan data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan	Ahli Muda	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional untuk penyusunan kajian dan tanggapan hukum	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				perjanjian internasional.			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			47	Menganalisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional.	Ahli Madya	analisis	a.	Terlaksananya analisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional untuk penyusunan kajian dan tanggapan hukum	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			48	Melakukan finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional untuk penyusunan kajian dan tanggapan hukum	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			49	Melakukan penyusunan konsep perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan hukum dan perjanjian internasional dalam bentuk kajian/tanggapan hukum	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			50	Menganalisis konsep perumusan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan hukum dan perjanjian internasional dalam bentuk kajian/tanggapan hukum	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			51	Melakukan finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Terlaksananya finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional dalam bentuk kajian/tanggapan hukum	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
			52	Melakukan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional.	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			53	Melakukan konsultasi teknis terkait hukum dan	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi teknis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				perjanjian internasional.			b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional terkait hukum dan perjanjian internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			54	Melakukan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional.	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi substansi adalah komunikasi atau pemberian masukan yang terkait substansi atau bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			55	Melakukan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional.	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			56	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Pertama	data/ informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa data/informasi
			57	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			58	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			59	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				kebijakan di bidang protokol			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			60	Melakukan konsultasi operasional di bidang protokol	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			61	Melakukan konsultasi taktis operasional di bidang protokol	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan supervisi terhadap persiapan rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			62	Melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memimpin/memberikan masukan agenda rapat/kebutuhan logistik/ *administrative arrangement*)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			63	Melakukan konsultasi strategis nasional di bidang protokol	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memimpin/memberikan masukan agenda rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			64	Melakukan kegiatan operasional di bidang protokol	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			65	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang protokol	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			66	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/unit organisasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			67	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang protokol	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas instansi/entitas yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional di bidang protokol	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
	b.	Memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi	1	Mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: penyusunan *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll yang akan digunakan pada kegiatan konsultasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

		internasional di dalam dan di luar negeri (negotiating)		dan kepentingan Pemerintah Indonesia.			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data dan informasi
			2	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: materi *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll yang akan digunakan pada kegiatan konsultasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			3	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: materi *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll yang akan digunakan pada kegiatan konsultasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			4	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: rekomendasi materi *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll yang akan digunakan pada kegiatan konsultasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
			5	Melakukan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			6	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan supervisi terhadap persiapan rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			7	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memimpin/memberikan masukan agenda rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			8	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memimpin/memberikan masukan agenda rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			9	Melakukan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menyusun notulensi program, mempersiapkan kebutuhan teknis program)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				dan kepentingan Pemerintah Indonesia.			b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, Surat Keputusan kepanitiaan (jika ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			10	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dalam memastikan kebutuhan teknis program/logistik telah tersedia, membuat draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, Surat Keputusan kepanitiaan (jika ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			11	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dan memastikan kebutuhan substansi program telah tersedia, menyempurnakan draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, Surat Keputusan kepanitiaan (jika ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			12	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dan memastikan kebutuhan substansi program telah tersedia, memfinalisasi draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, Surat Keputusan kepanitiaan (jika ada)

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			13	Mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional (contoh: mengumpulkan data dan informasi untuk persiapan rapat interkem yang diprogramkan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			14	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional (contoh: menyusun data dan informasi menjadi materi untuk persiapan rapat interkem yang diprogramkan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			15	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional (contoh: menganalisis data dan informasi menjadi materi untuk persiapan rapat interkem yang diprogramkan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			16	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional (contoh: menyempurnakan materi menjadi rekomendasi untuk persiapan rapat interkem yang diprogramkan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			17	Melakukan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*,korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, dll	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			18	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mengkaji persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			19	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberi arahan terkait persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			20	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan kontak dengan mitra sesuai dengan jenjangnya untuk menyukseskan perundingan internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			21	Melakukan kegiatan operasional terkait perundingan internasional	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menjadi *runner* perundingan/*liaison officer*, mencatat hasil perundingan internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		tugas, laporan delri, hasil perundingan, Surat Keputusan Kepanitiaan (jika ada)
			22	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dalam memastikan kebutuhan teknis program/logistik telah tersedia, membuat draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, laporan delri, hasil perundingan, Surat Keputusan Kepanitiaan (jika ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			23	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menyempurnakan bahan laporan dan dokumen perundingan internasional, mengoordinasikan jalannya perundingan internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, laporan delri, hasil perundingan, Surat Keputusan Kepanitiaan (jika ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			24	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: memfinalisasi bahan laporan dan dokumen perundingan internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, berita, surat), surat tugas, laporan delri, hasil perundingan, Surat Keputusan Kepanitiaan (jika ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
	c.	Perlindungan kepentingan negara dan pemerintah, Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (protecting)	1	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di	Ahli Pertama	tabulasi data/ informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data dan informasi
			2	Mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			3	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			4	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			5	Melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	a.	Koordinasi operasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya terkait logistik dengan menunjukkan kepatuhan terhadap jadwal program dan/atau perintah	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case* (contoh: menyiapkan logistik pertemuan/rapat interkem/rapat internal, menyusun notulensi)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			6	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	a.	Koordinasi taktis operasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan subunit kerja	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case* (contoh: memberikan supervisi terkait logistik pertemuan/rapat interkem/rapat internal)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			7	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	a.	Koordinasi strategis sektoral adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan unit kerja dan unit organisasi.	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case* (contoh: menjadi moderator kegiatan)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			8	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	a.	Koordinasi strategis nasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya yang berdampak nasional atau internasional.	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case* (contoh: menjadi narasumber kegiatan)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			9	Melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

							b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case* (contoh: penjemputan di bandara, menyerahterimakan korban TPPO ke Bareskrim)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			10	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			11	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/unit organisasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri (contoh: memimpin Tim Perbantuan Teknis Amnesti di luar negeri)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			12	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas instansi/entitas yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case* (contoh: menjadi koordinator Tim Perbantuan Teknis Amnesti di luar negeri)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			13	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	tabulasi data/ informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data dan informasi
			14	Mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			15	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			16	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			17	Melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan	Ahli Pertama	laporan	a.	Koordinasi operasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya terkait logistik dengan menunjukkan kepatuhan terhadap jadwal program dan/atau perintah	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri			b.	Terlaksananya koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			18	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	a.	Koordinasi taktis operasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan subunit kerja	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			19	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	a.	Koordinasi strategis sektoral adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya pada tingkatan unit kerja dan unit organisasi	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			20	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan	a.	Koordinasi strategis nasional adalah aktivitas berkomunikasi dengan mitra kerja pada jenjangnya yang berdampak nasional atau internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			21	Melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			22	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			23	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/unit organisasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			24	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas instansi/entitas yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri			b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			25	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan Permenlu mengenai paspor diplomatik dan paspor dinas, visa diplomatik dan visa dinas, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, *flight clearance* dan legalisasi, jasa kekonsuleran WNA, dll.)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			26	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran(contoh: memilah dan mengolah data dan informasi menjadi materi untuk penyusunan Permenlu mengenai paspor diplomatik dan paspor dinas, visa diplomatik dan visa dinas, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, *flight clearance* dan legalisasi, jasa kekonsuleran WNA, dll.)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			27	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: menganalisis materi untuk penyusunan permenlu mengenai paspor diplomatik dan paspor dinas, visa diplomatik dan visa dinas, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, *flight clearance* dan legalisasi, jasa kekonsuleran WNA, dll.)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis

			28	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: memberikan rekomendasi materi untuk penyusunan permenlu mengenai paspor diplomatik dan paspor dinas, visa diplomatik dan visa dinas, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, *flight clearance* dan legalisasi, jasa kekonsuleran WNA, dll.)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			29	Melakukan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran.	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan rapat koordinasi lintas unit kerja di Kemlu dan kementerian/lembaga terkait (Kemkumham, Setneg))	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional di bidang kekonsuleran (contoh: menyiapkan rapat koordinasi lintas unit kerja di Kemlu dan kementerian/lembaga terkait (Kemkumham, Setneg))	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			30	Melakukan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran.	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan supervisi pelaksanaan rapat koordinasi lintas unit kerja di Kemlu dan kementerian/lembaga terkait (Kemkumham, Setneg)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran (contoh: memberikan supervisi pelaksanaan rapat koordinasi lintas unit kerja di Kemlu dan kementerian/lembaga terkait (Kemkumham, Setneg))	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			31	Melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran.	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberi arahan terkait persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran(contoh: memimpin rapat/menjadi narasumber dalam rapat koordinasi lintas unit kerja di Kemlu dan kementerian/lembaga terkait (Kemkumham, Setneg))	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			32	Melakukan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran.	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan kontak dengan mitra sesuai dengan jenjangnya)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran (contoh: memberikan arahan terkait agenda rapat/menjadi narasumber dalam rapat koordinasi lintas unit kerja di Kemlu dan kementerian/lembaga terkait (Kemkumham, Setneg))	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			33	Melakukan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menyiapkan logistik dan administrasi kegiatan, menyusun draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional di bidang kekonsuleran	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (bila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			34	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan supervisi kesiapan logistik dan administrasi kegiatan, menyusun draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (bila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			35	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran.	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menjadi moderator kegiatan kekonsuleran, menyempurnakan draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (bila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			36	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas kementerian/lembaga nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menjadi narasumber kegiatan kekonsuleran, menyempurnakan draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran (contoh: menjadi narasumber kegiatan kekonsuleran, menyempurnakan draf laporan)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (bila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

	d.	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (*promoting*)	1	Menyiapkan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: mengumpulkan data dan informasi bagi materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi (contoh: bagi materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)
			2	Mengolah data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menyusun data dan informasi menjadi materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi (contoh: materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)
			3	Menganalisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menganalisis materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis (cth hasil analisis materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)
			4	Mengkaji materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan kajian	a.	Tersedianya pengkajian materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: mengkaji materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan kajian (contoh: kajian materi program kerja sama seperti seminar, pameran, bimbingan teknis, dll)

			5	Melakukan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan rapat/kebutuhan logistik/a*dministrative arrangement*,korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, dll	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menghubungi mitra kerja sesuai dengan jenjangnya, menyiapkan administrasi rapat)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			6	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mengkaji persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menghubungi mitra kerja sesuai dengan jenjangnya, memberikan supervisi atas persiapan administrasi rapat, menyusun notulensi rapat)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			7	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberi arahan terkait persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: mengkaji persiapan substansi rapat)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			8	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan masukan substansi/agenda rapat, memimpin rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			9	Melakukan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan kebutuhan operasional kegiatan, menyusun laporan program)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			10	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dalam persiapan kebutuhan operasional kegiatan, menyempurnakan laporan program)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			11	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan arahan agar kegiatan bisa mencapai target, menyempurnakan laporan program)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			12	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberikan arahan agar kegiatan bisa mencapai target, menyempurnakan laporan program)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			13	Mempersiapkan penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	data/ informasi	a.	Tersusunnya materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: data dan informasi untuk penyusunan *press briefing, press release, talking point*s untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa data/informasi (contoh: data dan informasi untuk penyusunan press briefing, press release, talking points untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)

			14	Mengolah materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: materi untuk penyusunan *press briefing, press release, talking points* untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b. Bukti hasil pekerjaan berupa materi (contoh: materi untuk penyusunan *press briefing, press release, talking points* untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)
			15	Menganalisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: analisis materi untuk penyusunan *press briefing, press release, talking points* untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b. Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis (contoh: analisis materi untuk penyusunan press briefing, press release, talking points untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)
			16	Melakukan finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: rekomendasi materi untuk penyusunan *press briefing, press release, talking points* untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b. Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi (contoh: rekomendasi materi untuk penyusunan press briefing, press release, talking points untuk wawancara, konten media sosial, infografis, media cetak, video, audio)

			17	Melakukan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: mengunggah konten media sosial, membantu terlaksananya program diseminasi informasi dalam hal logistik)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			18	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan taktis operasional adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dalam memastikan kebutuhan teknis program/logistik telah tersedia, membuat draf laporan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			19	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan strategis sektoral adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menjadi narasumber/pembicara pada diseminasi informasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			20	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis nasional adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program unit kerja/Perwakilan (contoh: menjadi narasumber/pembicara pada diseminasi informasi)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, nota dinas, surat, berita), surat tugas, SK kepanitiaan (apabila ada)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			21	Melakukan kegiatan operasional untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Pertama	laporan	a.	Kegiatan operasional adalah aktivitas di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program Perwakilan (contoh: menyiapkan logistik kegiatan kemasyarakatan)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan operasional untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, berita)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			22	Melakukan kegiatan teknis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Muda	laporan	a.	Kegiatan teknis adalah aktivitas pemberian supervisi di tingkat logistik dan administrasi yang dilakukan pada pelaksanaan program Perwakilan (contoh: melakukan supervisi dalam memastikan kebutuhan teknis program/logistik kegiatan kemasyarakatan telah tersedia, membuat draf laporan)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan teknis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, berita)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			23	Melakukan kegiatan substansi untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Madya	laporan	a.	Kegiatan substansi adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas unit kerja/bidang yang dilakukan pada pelaksanaan program Perwakilan(contoh: mengoordinasikan program pertemuan masyarakat yang melibatkan pejabat tinggi, melibatkan masyarakat pada program pelestarian budaya)	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan substansi untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, berita)

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			24	Melakukan kegiatan strategis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	Ahli Utama	laporan	a.	Kegiatan strategis adalah aktivitas pemberian masukan terkait substansi lintas K/L nasional dan internasional yang dilakukan pada pelaksanaan program Perwakilan (contoh: mengoordinasikan dan menjadi moderator/narasumber dalam program pertemuan masyarakat yang melibatkan pejabat tinggi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan strategis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum, berita)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
	e.	Penyampaian informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis dibidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Intrnasional didalam dan diluar negeri (*reporting)*	1	Mengidentifikasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Teridentifikasinya data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menyusun data dan informasi persiapan pelaksanaan Kongres organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi
			2	Menganalisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya analisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menganalisis data dan informasi menjadi materi persiapan pelaksanaan Kongres organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			3	Menyusun konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	konsep	a.	Tersusunnya konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menyusun konsep materi persiapan pelaksanaan Kongres organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep

			4	Melakukan finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Terlaksananya finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh:melakukan finalisasi materi persiapan pelaksanaan Kongres organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
			5	Melakukan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	laporan	a.	Konsultasi operasional adalah komunikasi atau persiapan dari segi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: mempersiapkan rapat/kebutuhan logistik/*administrative arrangement*,korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, dll	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum), surat tugas, laporan kegiatan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			6	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	laporan	a.	Konsultasi taktis operasional adalah komunikasi atau supervisi logistik untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan(contoh: mengkaji persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum), surat tugas, laporan kegiatan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			7	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan	a.	Konsultasi strategis sektoral adalah komunikasi atau pemberian masukan yang bersifat lintas sektoral untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: memberi arahan terkait persiapan logistik, korespondensi diplomatik, agenda, akomodasi, menghadiri rapat, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum), surat tugas, laporan kegiatan

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			8	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan	a.	Konsultasi strategis nasional adalah komunikasi atau pemberian masukan yang berdampak nasional atau internasional untuk melancarkan terlaksananya suatu program unit kerja/Perwakilan (contoh: melakukan kontak dengan mitra sesuai dengan jenjangnya)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum), surat tugas, laporan kegiatan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			9	Mempersiapkan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	tabulasi data/ informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data/informasi
			10	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			11	Menganalisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis

				politik luar negeri serta kedaulatan NKRI						
			12	Melakukan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
			13	Melakukan inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	a.	Terlaksananya inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data dan informasi
			14	Mengolah materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	materi	a.	Tersedianya materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			15	Menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis

			16	Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	laporan kajian	a.	Terlaksananya pengkajian pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan kajian
			17	Menyiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/ kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Pertama	kompilasi data	a.	Tersedianya data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil-hasil atau kesepakatan sidang/pertemuan terdahulu, mengidentifikasi posisi negara-negara terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data
			18	Menyusun konsep evaluasi kebijakan/ kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: menyusun data dan informasi mengenai hasil-hasil atau kesepakatan sidang/pertemuan terdahulu menjadi konsep evaluasi,menyusun peta posisi negara-negara terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			19	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan/ kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: menganalisis konsep evaluasi hasil-hasil atau kesepakatan sidang/pertemuan terdahulu menjadi draf evaluasi, memberikan masukan/rekomendasi terhadap peta posisi negara-negara terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			20	Melakukan finalisasi evaluasi kebijakan/ kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia(contoh: memfinalisasi draf evaluasi hasil-hasil atau kesepakatan sidang/pertemuan terdahulu menjadi laporan evaluasi, memberikan masukan/rekomendasi terhadap peta posisi negara-negara terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
			21	Mempersiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/ kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	kompilasi data	a.	Tersedianya data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data (memorandum,nota dinas, surat, berita)
			22	Mengolah materi evaluasi kebijakan/ kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	konsep	a.	Tersedianya data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep (memorandum,nota dinas, surat, berita)
			23	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan/ kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	draf	a.	Tersedianya data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf (memorandum,nota dinas, surat, berita)
			24	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/ kegiatan promosi dan pengembangan	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Tersedianya data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi (memorandum,nota dinas, surat, berita)

				kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.						
			25	Mempersiapkan data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional.	Ahli Pertama	kompilasi data	a.	Tersedianya data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data
			26	Mengolah materi evaluasi kebijakan perundingan internasional.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya pengolahan materi evaluasi kebijakan perundingan internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			27	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			28	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional.	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
			29	Mengidentifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Terlaksananya identifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			30	Mengolah materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			31	Menganalisis implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis

			32	Melakukan finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Terlaksananya finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
			33	Melaksanakan inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Terlaksananya inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			34	Mengolah materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya pengolahan materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			35	Menganalisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis terkait konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			36	Menyusun hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Tersedianya hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
			37	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.	Semua jenjang	laporan kajian	a.	Kajian terkait isu khusus merupakan kegiatan tugas jabatan yang bersifat mandiri (perorangan) dan diberikan oleh atasan langsung atas dasar penguasaan bidang tertentu	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan kajian
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			38	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan	Semua jenjang	laporan kajian	a.	Kajian strategis terkait isu khusus/lintas sektoral adalah tulisan ilmiah yang dibuat terkait isu yang mendapatkan prioritas dan perhatian publik dan berdampak besar pada pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				hubungan dan politik luar negeri.			b.	Tersedianya kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan kajian
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			39	Menelaah isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	laporan telaahan	a.	Laporan telaahan isu strategis sektoral adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh Diplomat yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan terkait isu lintas unit kerja/unit organisasi	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya telaahan isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan telaahan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			40	Menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya Ahli Utama	laporan telaahan	a.	Laporan telaahan isu strategis nasional adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh Diplomat yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan terkait isu lintas instansi/entitas lainnya	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya telaahan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri	b. Bukti hasil pekerjaan berupa laporan telaahan
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			41	Menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi.	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi adalah dokumen dinas yang memuat acuan yang berisi panduan penerapan atas suatu kebijakan tertentu	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersusun dan terlaksananya analisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi (contoh: menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi penyusunan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah)	b. Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	
			42	Mengolah materi bagi petunjuk operasional pedoman	Ahli Muda	materi	a.	Petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi adalah dokumen dinas yang memuat acuan yang berisi panduan penerapan atas suatu kebijakan tertentu	a. Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				pelaksanaan diplomasi.			b.	Terlaksananya pengolahan materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi (contoh: mengolah kompilasi data dan informasi menjadi materi bagi penyusunan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			43	Menyusun draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi.	Ahli Madya	draf	a.	Petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi adalah dokumen dinas yang memuat acuan yang berisi panduan penerapan atas suatu kebijakan tertentu	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersusunnya draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi (contoh: mengolah materi menjadi draf bagi penyusunan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			44	Menyusun rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi.	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi adalah dokumen dinas yang memuat acuan yang berisi panduan penerapan atas suatu kebijakan tertentu	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersusunnya rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi (contoh: menyusun rekomendasi bagi penyusunan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			45	Menyusun rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia.	Ahli Utama	rekomendasi	a.	Rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia adalah dokumen dinas yang berisi saran kebijakan yang berdampak nasional atau internasional dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersusunnya rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		

			46	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya penyiapan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			47	Mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			48	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri selain kasus di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			49	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri di luar kategori *high profile case*	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
			50	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya penyiapan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi

			51	Mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			52	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			53	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri terkait *high profile case* (contoh: hukuman mati, penyanderaan, evakuasi WNI, Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
			54	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Pertama	kompilasi data dan informasi	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			55	Mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi menjadi konsep materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			56	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf

			57	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
			58	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol.	Ahli Pertama	kompilasi data	a.	Tersedianya data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data
			59	Mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang protokol.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya pengolahan materi evaluasi kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			60	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			61	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol.	Ahli Utama	laporan evaluasi	a.	Terlaksananya finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan evaluasi
	f.	Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (*managing*)	1	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Tersusun dan terlaksananya analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: data dan informasi untuk penyusunan bahan masukan terkait pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi (contoh: untuk penyusunan bahan masukan terkait pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat)

			2	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: mengolah data dan informasi menjadi materi untuk penyusunan bahan masukan terkait pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			3	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menganalisis materi untuk penyusunan bahan masukan terkait pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			4	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: melakukan finalisasi untuk penyusunan bahan masukan terkait pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			5	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	konsep	a.	Tersusunnya konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menyusun konsep bahan masukan terkait organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			6	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menganalisis konsep bahan masukan terkait organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep

			7	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: melakukan finalisasi bahan masukan terkait organisasi profesi jabatan fungsional Diplomat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan
			8	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: mencari referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			9	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Muda	tabulasi materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: mengolah referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi materi
			10	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: Menganalisis referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			11	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: memberikan rekomendasi referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi

			12	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: menyusun konsep kebijakan berdasarkan referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			13	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: menganalisis konsep kebijakan menjadi draf berdasarkan referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			14	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (contoh: memberikan rekomendasi konsep kebijakan berdasarkan referensi mengenai kebijakan pelayanan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik domestik, regional maupun internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			15	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: kertas posisi, pedoman delri, bahan perundingan/dokumen untuk perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi

			16	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: kertas posisi, pedoman delri, bahan perundingan/dokumen untuk perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			17	Menganalisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: kertas posisi, pedoman delri, bahan perundingan/dokumen untuk perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			18	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: kertas posisi, pedoman delri, bahan perundingan/dokumen untuk perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			19	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: menyusun konsep pedoman delri, kertas posisi, bahan perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			20	Menganalisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: menyempurnakan konsep pedoman delri, kertas posisi, bahan perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			21	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional (contoh: memfinalisasi konsep pedoman delri, kertas posisi, bahan perundingan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan

			22	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional (contoh: melakukan riset untuk penyempurnaan draf perjanjian internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi
			23	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	tabulasi materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional(contoh: memberikan supervisi penyusunan draf perjanjian internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi materi
			24	Menganalisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional (contoh: memberikan masukan untuk penyempurnaan draf perjanjian internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			25	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional (contoh: memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan draf perjanjian internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan
			26	Mengolah data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Muda	draf	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional (contoh: menyusun draf perjanjian internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			27	Menganalisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Madya	konsep	a.	Terlaksananya analisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional (contoh: menyempurnakan draf perjanjian internasional menjadi konsep)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep

			28	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional (contoh: memberikan rekomendasi atas konsep perjanjian internasional)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan
			29	Mengidentifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	a.	Terlaksananya identifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data dan informasi (contoh: tabulasi data dan informasi pemberitaan media nasional/internasional tentang diplomasi Indonesia)
			30	Mempersiapkan materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	materi	a.	Tersedianya materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi (contoh: materi pemberitaan media nasional/internasional tentang diplomasi Indonesia)
			31	Menganalisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			32	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi (contoh: rekomendasi materi pemberitaan media nasional/internasional tentang diplomasi Indonesia)
			33	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep awal bahan masukan (contoh: analisis dan statistik pemberitaan media sosial dan media massa, konsep laporan khusus mengenai pemberitaan media asing terhadap Indonesia)
			34	Menganalisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf bahan masukan (contoh: analisis dan statistik pemberitaan media sosial dan media massa)
			35	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang hubungan	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan bahan masukan (contoh: analisis dan statistik pemberitaan media sosial dan media massa)

				dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI						
			36	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Pertama	tabulasi data dan informasi	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa tabulasi data dan informasi
			37	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			38	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			39	Melakukan finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi

			40	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: konsep bahan masukan terkait kebijakan di bidang kekonsuleran berdasarkan kepada asas resiprositas untuk paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			41	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: menyempurnakan konsep bahan masukan terkait kebijakan di bidang kekonsuleran berdasarkan kepada asas resiprositas, untuk paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			42	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran.	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran (contoh: memfinalisasi draf bahan masukan terkait kebijakan di bidang kekonsuleran berdasarkan kepada asas resiprositas, untuk paspor diplomatik dan dinas, visa diplomatik dan dinas, izin tinggal, *flight clearance*, jasa kekonsuleran WNA, legalisasi, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan
			43	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol.	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data dan informasi
			44	Melakukan penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi

			45	Menganalisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			46	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			47	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang protokol.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			48	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf
			49	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol.	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan
			50	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya penyusunan dan analisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: bahan penyusunan *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi

			51	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Muda	materi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: bahan penyusunan *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa materi
			52	Menganalisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: bahan penyusunan *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis
			53	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Utama	rekomendasi materi	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan di penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (contoh: bahan penyusunan *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi materi
			54	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (konsep awal *concept note*, konsep dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep
			55	Menganalisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (draf *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf

			56	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia (rekomendasi *concept note*, draf dokumen *nonpaper*, TOR, dll)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan
			57	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Pertama	kompilasi data/ informasi	a.	Terlaksananya pengolahan data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: kompilasi data/informasi terkait *media monitoring/daily briefing*/laporan mingguan/analisis kebutuhan diklat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa kompilasi data/informasi (contoh: terkait *media monitoring/daily briefing*/laporan mingguan)
			58	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penelaahan data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menelaah data dan informasi terkait konsep bahan masukan/analisis kebutuhan diklat)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep (contoh: konsep bahan masukan: memorandum, nota dinas, surat, berita)
			59	Menganalisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	draf	a.	Terlaksananya analisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menganalisis materi terkait konsep bahan masukan menjadi draf)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf (contoh: draf bahan masukan: memorandum, nota dinas, surat, berita)
			60	Mengkaji materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di	Ahli Utama	hasil kajian	a.	Terlaksananya pengkajian materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: mengkaji draf terkait bahan masukan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat

				bidang hubungan dan politik luar negeri.			b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa draf (contoh: hasil kajian dalam bentuk bahan masukan: memorandum, nota dinas, surat, berita)
			61	Melakukan penyusunan konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Muda	konsep	a.	Terlaksananya penyusunan konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menyusun konsep bahan masukan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa konsep bahan masukan
			62	Menganalisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Madya	dokumen hasil analisis	a.	Terlaksananya analisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: menyempurnakan bahan masukan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa dokumen hasil analisis bahan masukan
			63	Melakukan finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.	Ahli Utama	rekomendasi perumusan	a.	Terlaksananya finalisasi rencana kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri (contoh: memberikan rekomendasi bahan masukan)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa rekomendasi perumusan bahan masukan
	g.	Pelaksanaan kegiatan lain terkait tugas diplomasi	1	Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	laporan	a.	Penjurubahasaan adalah pengalihbahasaan secara lisan dari suatu bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya.	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya penugasan dalam bidang penjurubahasaan	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan (memorandum)/surat tugas
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			2	Melaksanakan kegiatan koordinasi nonsubstansi pada Perwakilan	Ahli Pertama Ahli Muda	laporan	a.	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi nonsubstansi pada Perwakilan dibuat secara bulanan untuk Asisten Kepala Kanselerai (HoC) dan per triwulan untuk MKP	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan koordinasi nonsubstansi pada Perwakilan (contoh: menjadi Asisten Kepala Kanselerai (HoC), menjadi Manajer Kinerja di Perwakilan/MKP)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan bulanan untuk Asisten HoC dan per triwulan untuk MKP dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Asisten Kepala Kanselerai (HoC)/MKP

							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
			3	Melakukan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan nonsubstansi pada Perwakilan	Ahli Madya	laporan	a.	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan nonsubstansi pada Perwakilan dibuat per bulan untuk Kepala Kanselerai (HoC)	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi yang mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja Diplomat
							b.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan nonsubstansi pada Perwakilan sebagai Kepala Kanselerai (HoC)	b.	Bukti hasil pekerjaan berupa laporan pelaksanaan tugas Kepala Kanselerai dan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Kanselerai (HoC)
							c.	Tersedianya dokumentasi/dokumen bukti yang sesuai untuk setiap kegiatan		
	C	**PENGEMBANGAN PROFESI**								
	a.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:							
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Semua jenjang	Buku	a.	tersusunnya hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam bentuk buku	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi dan mempunyai SIUP serta memiliki nomor registrasi buku dan dicetak paling sedikit 300 (tiga ratus) eksemplar atau menjadi juara satu, dua, atau tiga dalam lomba Karya Tulis/Karya Ilmiah tingkat nasional	b.	buku asli / fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat
							c.	buku tersebut diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional.	c.	dalam hal karya tulis/karya ilmiah diikutkan dalam lomba karya tulis/karya ilmiah tingkat nasional atau internasional, dibuktikan dengan fotokopi piagam kejuaraan atau sertifikat
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	Majalah	a.	terpublikasikannya karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam majalah ilmiah	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	majalah tersebut membahas bidang politik dan hubungan luar negeri dan diakui oleh Kementerian Luar Negeri atau oleh LIPI	b.	majalah asli/fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
			a.	Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Buku	a.	tersusunnya karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam bentuk buku	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri	b.	buku asli / fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat atau oleh perpustakaan Kementerian

			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	Majalah	a.	terpublikasikannya karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam majalah ilmiah	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	majalah tersebut membahas bidang politik dan hubungan luar negeri dan didokumentasikan di perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri	b.	majalah asli/fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat atau oleh perpustakaan Kementerian
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:							
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Semua jenjang	Buku	a.	tersusunnya karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam bentuk buku	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi dan mempunyai SIUP serta memiliki nomor registrasi buku dan dicetak paling sedikit 300 (tiga ratus) eksemplar	b.	buku asli/fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat
							c.	buku tersebut diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional		
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	Majalah	a.	terpublikasikannya karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam majalah ilmiah	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	majalah tersebut membahas bidang politik dan hubungan luar negeri dan diakui oleh Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan, atau oleh LIPI	b.	majalah asli/fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
			a.	Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Buku	a.	tersusunnya Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam bentuk buku	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri	b.	buku asli / fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat atau oleh perpustakaan Kementerian
			b.	Dalam makalah	Semua jenjang	Makalah	a.	tersusunnya Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam bentuk makalah	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri	b.	makalah asli/fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat atau oleh perpustakaan Kementerian Luar Negeri

			5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang politik dan hubungan luar negeri yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Semua jenjang	Naskah	a.	terpublikasikannya tulisan ilmiah populer berupa bahasan di bidang politik dan hubungan luar negeri di media massa untuk setiap judul	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan atau apabila tulisan tersebut dimuat secara berseri atau bersambung hanya dinilai 1 (satu) kali	b.	fotokopi/guntingan/*print screen* media massa yang memuat tulisan tersebut dengan mencantumkan nama dan tanggal penerbitan dan disahkan oleh pimpinan unit kerja Diplomat
									c.	surat keterangan kepala studio atau pimpinan redaksi yang bersangkutan tentang waktu penyiaran atau penayangan apabila naskah tulisan ilmiah disiarkan oleh media radio atau televisi.
			6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Semua jenjang	Naskah	a.	terlaksananya penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pertemuan ilmiah nasional	a.	Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
							b.	prasaran tersebut tidak harus berupa rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir	b.	naskah asli/fotokopi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah
									c.	surat keterangan dari penyelenggara bahwa yang bersangkutan menyampaikan prasaran dalam pertemuan ilmiah
	b.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan							
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Semua jenjang	Buku	a.	tersusunnya buku hasil terjemahan/saduran di bidang politik dan hubungan luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
							b.	diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi dan mempunyai SIUP serta memiliki nomor registrasi buku dan dicetak paling sedikit 300 (tiga ratus) eksemplar	b.	buku cetakan hasil penerjemahan/ penyaduran asli/fotokopi hasil kerja yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja
							c.	buku tersebut diedarkan secara nasional atau internasional		
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Luar Negeri.	Semua jenjang	Majalah	a.	terpublikasikannya hasil terjemahan/saduran di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam majalah ilmiah	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
							b.	majalah ilmiah tersebut membahas bidang politik dan hubungan luar negeri dan diakui oleh Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan, atau oleh LIPI	b.	majalah cetakan hasil penerjemahan/penyaduran asli/fotokopi hasil kerja yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja
			2. Menerjemahkan/menyadur buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan							
			a.	Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Buku	a.	tersusunnya buku hasil terjemahan/saduran dari buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

							b.	buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri	b.	buku cetakan hasil penerjemahan/ penyaduran asli/fotokopi hasil kerja yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja
			b.	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait	Semua jenjang	Makalah	a.	tersusunnya makalah hasil terjemahan/saduran dari buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
							b.	makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri	b.	makalah hasil penerjemahan/penyaduran asli/fotokopi hasil kerja yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja
	c.	Menyusun buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri	1	Menyusun buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri	Semua jenjang	Pedoman	Tersusunnya buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri		a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
									b.	buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri
			2	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri	Semua jenjang	Juklak	Tersusunnya ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri		a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
									b.	Surat penugasan
									c.	Surat keputusan tim penyusun
									d.	dokumen ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri
			3	Menyusun ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri	Semua jenjang	Juknis	Tersusunnya ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri		a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
									b.	Surat penugasan
									c.	Surat keputusan tim penyusun
									d.	dokumen ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri
	d.	Menyusun sistem/ mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan diplomasi yang efektif		Menyusun pembaruan Standar Operasional Prosedur mikro yang berlaku di unit kerja/Perwakilan	Semua jenjang	Surat penugasan/SK	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur mikro yang telah diperbarui dan berlaku di unit kerja/Perwakilan		a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
									b.	Surat penugasan/SK
									c.	Dokumen Standar Operasional Prosedur mikro yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
II	**PENUNJANG**									
	a.	Penugasan sebagai pengajar/pelatih di bidang politik dan hubungan luar negeri	a.	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri	Ahli Madya/Ahli Utama	Materi ajaran	a.	terlaksananya pengajaran/pelatihan/*mentoring* pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri setiap 2 (dua) jam pelajaran	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Diplomat
							b.	kegiatan diselenggarakan oleh kelembagaan diklat pemerintah atau swasta	b.	Surat tugas atau piagam dari panitia penyelenggara yang menyatakan bahwa Diplomat tersebut mengajar/melatih disertai jadwal dan jumlah jam mengajar/melatih
							c.	memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yaitu sebagai berikut:		

								1	sesuai dengan bidang tugas Diplomat yang bersangkutan	
								2	terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri	
								3	terkait penerapan/penyebaran teknologi tepat guna di bidang politik dan hubungan luar negeri	
	b.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang politik dan hubungan luar negeri							
			a.	Pemrasaran /penyaji/ narasumber	Semua jenjang	Materi	a.	terlaksananya penyampaian prasaran/kegiatan penyaji/peran narasumber dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang politik dan hubungan luar negeri tingkat nasional atau daerah dan tidak melibatkan pihak negara lain dan/atau Organisasi Internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Diplomat
							b.	materi yang dibahas terkait bidang politik dan hubungan luar negeri	b.	naskah asli/fotokopi materi yang disampaikan dalam seminar/lokakarya/konferensi
							c.	Diselenggarakan secara resmi oleh instansi atau lembaga atau organisasi profesi	c.	Sertifikat seminar/lokakarya atau surat keterangan dari penyelenggara bahwa yang bersangkutan menyampaikan prasaran/kegiatan penyaji/peran narasumber
			b.	Pembahas /moderator	Semua jenjang	Laporan	a.	terlaksananya kegiatan sebagai pembahas/moderator dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang politik dan hubungan luar negeri tingkat nasional atau daerah dan tidak melibatkan pihak negara lain dan/atau Organisasi Internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Diplomat
							b.	materi yang dibahas terkait bidang politik dan hubungan luar negeri	b.	naskah asli/fotokopi pembahasan seminar/lokakarya/konferensi
							c.	diselenggarakan secara resmi oleh instansi atau lembaga atau organisasi profesi	c.	Surat keterangan mengikuti seminar/lokakarya/konferensi dari penyelenggara/panitia seminar/ lokakarya/ konferensi bahwa Diplomat yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar/lokakarya/konferensi tersebut
			c.	Peserta	Semua jenjang	Laporan	a.	terlaksananya kegiatan sebagai peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang politik dan hubungan luar negeri tingkat nasional atau daerah dan tidak melibatkan pihak negara lain dan/atau Organisasi Internasional	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Diplomat
							b.	materi yang dibahas terkait bidang politik dan hubungan luar negeri	b.	naskah asli/fotokopi pembahasan seminar/lokakarya/konferensi

							c.	diselenggarakan secara resmi oleh instansi atau lembaga atau organisasi profesi	c.	surat keterangan mengikuti seminar/lokakarya/konferensi dari penyelenggara /panitia seminar/ lokakarya/ konferensi bahwa Diplomat yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar/lokakarya/konferensi tersebut
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah							
			a.	Ketua	Semua jenjang	Laporan	Terlaksananya peran serta dalam delegasi ilmiah sebagai ketua untuk setiap kegiatan			Laporan delegasi ilmiah
			b.	Anggota	Semua jenjang	Laporan	Terlaksananya peran serta dalam delegasi ilmiah sebagai anggota untuk setiap kegiatan			Laporan delegasi ilmiah
	c.	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi nasional							
			a.	Pengurus aktif	Semua jenjang	SK	a.	terlaksananya keanggotaan dalam organisasi profesi sebagai pengurus aktif per tahun	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Diplomat
							b.	organisasi profesi yang diakui adalah organisasi yang dibentuk atas fasilitasi Kementerian Luar Negeri	b.	fotokopi kartu anggota atau keterangan/keputusan sebagai pengurus aktif
			b.	Anggota aktif	Semua jenjang	SK	a.	terlaksananya keanggotaan dalam organisasi profesi sebagai anggota per tahun	a.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Diplomat
							b.	organisasi profesi yang diakui adalah organisasi yang dibentuk atas fasilitasi Kementerian Luar Negeri	b.	fotokopi kartu anggota atau keterangan/keputusan sebagai anggota aktif
	d.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat	Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat							
			a.	Ketua	Ahli Utama	SK	a.	terlaksananya kegiatan penilaian Jabatan Fungsional Diplomat sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan untuk setiap DUPAK	a.	fotokopi atau salinan surat keputusan sebagai Ketua Tim Penilai yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
							b.	sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun	b.	rekapitulasi Diplomat yang dinilai dari Sekretariat Tim Penilai
							c.	ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		
			b.	Anggota	Ahli Muda/Ahli Madya	SK	a.	terlaksananya kegiatan penilaian Jabatan Fungsional Diplomat sebagai Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan untuk setiap DUPAK	a.	fotokopi atau salinan surat keputusan sebagai Anggota Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
							b.	sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun	b.	rekapitulasi Diplomat yang dinilai dari Sekretariat Tim Penilai
							c.	ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		
	e.	Kelompok kerja/panitia kegiatan	Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan							

			a.	Ketua/Wakil Ketua	Ahli Utama/Ahli Madya	SK	a.	terlaksananya kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan sebagai ketua/wakil ketua untuk setiap kegiatan		Fotokopi atau salinan surat keputusan sebagai Ketua/Wakil Ketua dalam kelompok kerja/panitia kegiatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
							b.	ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		
			b.	Sekretaris/Anggota	Semua jenjang	SK	a.	terlaksananya kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan sebagai sekretaris/anggota untuk setiap kegiatan		Fotokopi atau salinan surat keputusan sebagai Sekretaris/Anggota Tim dalam kelompok kerja/panitia kegiatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
							b.	ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		
	f.	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
			a.	Penghargaan Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya						
				1) 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Piagam	a.	diperolehnya tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun		fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
							b.	diberikan oleh pemerintah atas pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu		
							c.	dalam bidang politik dan hubungan luar negeri		
				2) 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Piagam	a.	diperolehnya tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun		fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
							b.	diberikan oleh pemerintah atas pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu		
							c.	dalam bidang politik dan hubungan luar negeri		
				3) 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Piagam	a.	diperolehnya tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun		fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
							b.	diberikan oleh pemerintah atas pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu		
							c.	dalam bidang politik dan hubungan luar negeri		
			b.	Penghargaan lainnya						
				1) Internasional						
				a) Kepala Negara	Semua jenjang	Tanda Jasa	diperolehnya tanda jasa atas prestasi atau penghargaan bertaraf internasional yang diberikan oleh Kepala Negara atau pejabat setara kepada Diplomat			fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
				b) Menteri	Semua jenjang	Tanda Jasa	diperolehnya tanda jasa atas prestasi atau penghargaan bertaraf internasional yang diberikan oleh Menteri atau pejabat setara kepada Diplomat			fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas

				c) Lainnya	Semua jenjang	Tanda Jasa	diperolehnya tanda jasa atas prestasi atau penghargaan bertaraf internasional yang diberikan oleh suatu lembaga/instansi/figur publik kepada Diplomat			fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
				2) Kementerian	Semua jenjang	Tanda Jasa	a.	terdapatnya tanda jasa atas prestasi atau penghargaan yang diberikan oleh dan/atau atas nama Kementerian kepada Diplomat		fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
							b.	dalam bidang politik dan hubungan luar negeri		
				3) Kepala Perwakilan	Semua jenjang	Sertifikat / Piagam	a.	terdapatnya tanda jasa atas prestasi atau penghargaan yang diberikan oleh dan/atau atas nama Kepala Perwakilan kepada Diplomat		fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja/Perwakilan di mana Diplomat bertugas
							b.	dalam bidang politik dan hubungan luar negeri		
	g.	Perolehan ijazah/gelar lainnya	Memperoleh ijazah/gelar lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
			a.	Sarjana (S1)/Diploma IV	Semua jenjang	Ijazah/ gelar	a.	telah mengikuti pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B	a.	fotokopi keputusan tugas belajar/izin belajar
							b.	perolehan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV adalah gelar yang diperoleh lagi di samping gelar yang telah diperolehnya atau kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	b.	fotokopi ijazah yang disahkan oleh: Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana apabila lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta apabila lulusan Perguruan Tinggi Swasta;
									c.	fotokopi ijazah yang disahkan oleh Tim Penilai Ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan di Perguruan Tinggi Luar Negeri
			b.	Magister (S2)	Semua jenjang	Ijazah/ gelar	a.	telah mengikuti pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B	a.	fotokopi keputusan tugas belajar/izin belajar
							b.	perolehan ijazah Magister (S2) adalah gelar yang diperoleh lagi di samping gelar yang telah diperolehnya atau yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	b.	fotokopi ijazah yang disahkan oleh: Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana apabila lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta apabila lulusan Perguruan Tinggi Swasta;
									c.	fotokopi ijazah yang disahkan oleh Tim Penilai Ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan di Perguruan Tinggi Luar Negeri
			c.	Doktor (S3)	Semua jenjang	Ijazah/ gelar	a.	telah mengikuti pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B	a.	fotokopi keputusan tugas belajar/izin belajar

							b.	perolehan ijazah Doktor (S3) adalah gelar yang diperoleh lagi di samping gelar yang telah diperolehnya atau yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya		b.	fotokopi ijazah yang disahkan oleh: Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana apabila lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta apabila lulusan Perguruan Tinggi Swasta;
										c.	fotokopi ijazah yang disahkan oleh Tim Penilai Ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan di Perguruan Tinggi Luar Negeri

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI/KONSULTASI/PENDEKATAN

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI/PERWAKILAN

LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI/KONSULTASI/PENDEKATAN (1)

BULAN ... TAHUN ... (2)

NOMOR: ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (4) :
NIP (5) :
Jabatan (6) :
Jenjang Jabatan (7) :
Unit Kerja/Perwakilan (8) :

Telah melaksanakan kegiatan koordinasi/konsultasi/pendekatan(9) operasional/taktis operasional/strategis sektoral/strategis nasional(10) sebagai berikut.

Hari, Tanggal	No	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Hasil/ Tindak Lanjut	Keterangan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

(tempat), (tanggal/tahun) (17)

Mengetahui,
Jabatan (18)

Nama Pejabat (20)
NIP. (22)

Jabatan (19)

Nama Pejabat (21)
NIP. (23)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III HURUF B
FORMAT LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI/KONSULTASI/PENDEKATAN

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Coret yang tidak perlu.
2.	2)	Diisi dengan bulan dan tahun pelaksanaan kegiatan.
3.	3)	Diisi dengan nomor laporan.
4.	4)	Diisi dengan nama pejabat penyusun laporan.
5.	5)	Diisi dengan NIP pejabat penyusun laporan.
6.	6)	Diisi dengan jabatan pejabat penyusun laporan.
7.	7)	Diisi dengan jenjang jabatan penyusun laporan.
8.	8)	Coret yang tidak perlu, diisi dengan nama unit kerja/Perwakilan pejabat penyusun laporan.
9.	9)	Coret yang tidak perlu.
10.	10)	Coret yang tidak perlu.
11.	11)	Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan.
12.	12)	Diisi dengan nomor kegiatan.
13.	13)	Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan (koordinasi/konsultasi/pendekatan) dan jenjangnya (operasional/taktis operasional/strategis sektoral/strategis nasional).
14.	14)	Diisi dengan deskripsi kegiatan yang dilaksanakan.
15.	15)	Diisi dengan hasil atau langkah tindak lanjut dari kegiatan.
16.	16)	Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
17.	17)	Diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun pembuatan laporan.
18.	18)	Diisi dengan jabatan atasan langsung.
19.	19)	Diisi dengan jabatan pejabat penyusun laporan.
20.	20)	Diisi dengan nama atasan langsung
21.	21)	Diisi dengan nama pejabat penyusun laporan.
22.	22)	Diisi dengan NIP atasan langsung.
23.	23)	Diisi dengan NIP pejabat penyusun laporan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT
NOMOR : ..... [1)]

Instansi : .....

Masa Penilaian :
Tanggal ..... s/d tanggal .....[2)]
Tahun .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				[3)]
	2	NIP				[4)]
	3	Nomor Seri KARPEG				[5)]
	4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				[6)]
	5	Tempat dan Tanggal Lahir				[7)]
	6	Jenis Kelamin				[8)]
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				[9)]
	8	Jabatan Fungsional/TMT				[10)]
	9	Unit Kerja				[11)]
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	A	Pendidikan Sekolah				[12)]
	B	Angka Kredit Penjenjangan				
		1	UTAMA			
			a.	Pendidikan dan pelatihan di bidang diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)		[13)]
			b.	Kegiatan Diplomasi		[14)]
			c.	Pengembangan Profesi		[15)]
		Jumlah Unsur Utama				[16)]
		2	PENUNJANG			
				Kegiatan Penunjang Diplomasi		[17)]
		Jumlah Unsur Penunjang				[18)]
JUMLAH PENDIDIKAN SEKOLAH DAN ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						[19)]
III	BELUM DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ...../ PANGKAT ..... [20)]					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan Tembusan disampaikan kepada: 1. Diplomat yang bersangkutan; 2. Sekretaris Tim Penilai Diplomat yang bersangkutan 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenlu 4. Sekretariat Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kemenlu 5. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan 6. Pejabat lain yang dipandang perlu	Ditetapkan di ..... 21) Pada tanggal ..... Nama Lengkap 22) NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah Nomor Hasil Penilaian Angka Kredit.
2.	2)	TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Diplomat yang belum pernah mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak SK pengangkatan. b. Bagi Diplomat yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal/masa penilaian terakhir yang pernah diusulkan. TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Maksimal satu tahun terakhir terhitung dari tanggal mulai penilaian yang diusulkan.
3.	3)	Tulislah nama Diplomat.
4.	4)	Tulislah NIP Diplomat.
5.	5)	Tulislah Nomor Kartu Pegawai Diplomat.
6.	6)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Diplomat yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya pangkat tersebut.
7.	7)	Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Diplomat.
8.	8)	Diisi dengan jenis kelamin.
9.	9)	Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Diplomat sesuai DUPAK.
10.	10)	Tulislah jabatan Diplomat sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.
11.	11)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
12.	12)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan yang diperoleh Diplomat dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan PAK terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. *Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.*
13.	13)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Diplomat dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. *Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.*
14.	14)	Tulislah angka kredit dari kegiatan diplomasi yang diperoleh Diplomat dalam masa penilaian sebelumnya. *Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.*
15.	15)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Diplomat dalam masa penilaian sebelumnya. *Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.*
16.	16)	Merupakan penjumlahan dari kolom unsur utama (angka kredit harus sesuai dengan kolom jumlah unsur utama pada PAK/HAPAK terakhir).

17.	17)	Tulislah angka kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Diplomat dalam masa penilaian sebelumnya. *Kolom terakhir (jumlah) tidak diisi.*
18.	18)	Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang (angka kredit harus sesuai dengan kolom jumlah unsur penunjang pada PAK/HAPAK terakhir).
19.	19)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pendidikan sekolah dan angka kredit penjenjangan (angka kredit harus sesuai dengan kolom jumlah pada PAK/HAPAK terakhir).
20.	20)	Tulislah jabatan Diplomat yang sesuai dan pangkat/golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan mempertimbangkan komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat jabatan fungsional Diplomat (Lampiran II, III, dan IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat).
21.	21)	Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.
22.	22)	Tulislah nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(1) Nama :

(2) NIP :

(3) Jabatan :

Menyatakan bahwa,

(4) Nama :

(5) NIP :

(6) Pangkat/Gol. Ruang/TMT :

(7) Unit Kerja/Perwakilan/Instansi :

telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Diplomasi paling kurang 2 (dua) tahun.

(8) ....., ...
Yang membuat pernyataan

(9) .....
(10) NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN

(1) Diisi dengan nama pimpinan unit kerja/Perwakilan/Instansi;
(2) Diisi NIP Pimpinan unit kerja/Perwakilan/Instansi;
(3) Diisi jabatan pimpinan unit kerja/Perwakilan/Instansi;
(4) Diisi dengan nama pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
(5) Diisi NIP pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
(6) Diisi pangkat/Gol. Ruang/TMT pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
(7) Diisi unit kerja/Perwakilan/Instansi pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
(8) Diisi kota, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat pernyataan;
(9) Diisi tanda tangan pimpinan unit kerja/Perwakilan/Instansi; dan
(10) Diisi NIP pimpinan unit kerja/Perwakilan/Instansi.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

NO	PANGKAT PNS	GOL. RUANG PNS	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	≥ 4 Tahun
1.	Penata Muda	III/a	100	113	125	138	150
2.	Penata Muda Tk. I	III/b	150	163	175	188	200
3.	Penata	III/c	200	225	250	275	300
4.	Penata Tk. I	III/d	300	325	350	375	400
5.	Pembina	IV/a	400	438	475	513	550
6.	Pembina Tk. I	IV/b	550	588	625	663	700

7.	Pembina Utama Muda	IV/c	700	738	775	813	850
8.	Pembina Utama Madya	IV/d	850	900	950	1.000	1.050
9.	Pembina Utama	IV/e	1.050				

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L.P. MARSUDI